BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adakalanya dalam perkawinan tersebut rumah tangga yang dibina utuh hingga akhir hayat, namun, adakalanya di dalam perjalanannya, banyak rumah tangga yang tidak bisa dipertahankan. Tentu saja, dengan beragam masalah. Perceraian kemudian diyakini sebagai satu-satunya jalan yang harus dipilih untuk keluar dari beragam persoalan tersebut. Perceraian akan berakibat pada aspek aspek lain dalam rumah tangga, seperti hak asuh anak, nafkah yang selama ini terabaikan oleh suami, hingga pembagian harta bersama.¹ Fiqih Islam klasik tidak mengenal harta bersama bahkan kalau terjadi perceraian, maka harus dilihat siapa pemilik hartanya, namun dalam konteks Indonesia, fiqih yang berlaku di Indonesia, yang dikenal dengan hukum Islam hasil ijtihad bangsa Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya serta Lampiran Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (“KHI”). KHI (Kompilasi Hukum Islam), sebagai kodifikasi hukum Islam pertama di Indonesia yang eksistensinya berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991, Inpres itu kemudian ditindaklanjuti

¹ Putra Tondi Martu Hasibuan, *Hak Kekayaan Intelektual sebagai Harta Bersama (Analisis Komparatif antara Hukum Perkawinan dan Hukum Hak Kekayaan Intelektual)*, Artikel, PA-sibuhuan.go.id. di, diakses pada tanggal 20 November 2023.

dengan keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama, tanggal 21 Maret 1985.

Dari dua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tersebut dikenal adanya harta Bersama, dalam Pasal 35 UU Perkawinan dikenal harta bersama. Dalam pasal tersebut, harta dalam perkawinan (rumah tangga)

dibedakan menjadi :

1. Harta yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi “harta bersama”
2. Harta bawaan masing-masing suami istri, baik harta tersebut diperoleh sebelum menikah atau dalam pernikahan yang diperoleh masing-masing sebagai harta pribadi, contohnya, hadiah atau warisan. Harta pribadi sepenuhnya berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.²

Demikian juga dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan bahwa harta perkawinan dapat dibagi atas

1. Harta bawaan suami, yaitu harta yang dibawa suami sejak sebelum perkawinan;
2. Harta bawaan istri, yaitu harta yang dibawanya sejak sebelum perkawinan;
3. Harta bersama suami istri, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi harta bersama suami istri;

² Lihat pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

4. Harta hasil dari hadiah, hibah, waris, dan shadaqah suami, yaitu harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan;
5. Harta hasil hadiah, hibah, waris, dan shadaqah istri, yaitu harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan.³ Dua sumber hukum Islam yang berlaku di Indonesia (fikih Islam Indonesia) mengakui ada harta bersama dikarenakan perkawinan itu dianggap sebagai bentuk syirkah, yaitu bersatu, berserikat untuk membentuk rumah tangga. Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Pembagian Harta Bersama Dari Hasil Royalti Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang penelitian di atas upaya menjadi lebih terarah maka penulis akan rumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bagaimana ketentuan penyelesaian royalti dalam hukum positif sebagai harta bersama?
- b. Bagaimana ketentuan penyelesaian pembagian harta bersama dari hasil royalti dalam KHI sebagai harta bersama?

³ Lihat pasal 85 sampai dengan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini untuk memaparkan sebagai berikut:

- a. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: Pertama, untuk mengetahui hasil royalti yang lahir selama perkawinan dapat dikualifikasikan sebagai harta bersama menurut hukum perkawinan Islam;
- b. Kedua, untuk mengetahui penyelesaian pembagian royalti sebagai harta bersama dalam perceraian Islam. Dan untuk mengetahui hasil dari royalti sebagai harta bersama dalam perspektif KHI dan Hukum positif.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan beberapa tujuan masalah yang sudah peneliti paparkan, maka peneliti berharap agar penelitian ini bisa memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan khazanah keilmuan khususnya di bidang perkawinan khususnya dalam permasalahan royalti sebagai harta bersama setelah perceraian.
 - b. Membeikan wawasan mengenai pembagian harta bersama dari

hasil royalti setelah perceraian.

- c. Menambah sumber referensi terkait Hak Kekayaan Intelektual sebagai harta bersama setelah perceraian.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi keilmuan dan juga diharapkan bisa memberikan berbagai penjelasan mengenai permasalahan royalti yang lahir selama perkawinan.

E. Penegasan Istilah

Adapun penegasan istilah dalam penelitian ini, dibagi dalam dua kategori yaitu penegasan secara konseptual dan operasional. Agar di dalam penelitian tidak terjadi adanya penafsiran yang berbeda dengan maksud peneliti, maka peneliti akan menjelaskan istilah pada judul penelitian ini. Istilah yang perlu peneliti jelaskan adalah, sebagai berikut:

- a. Harta bersama

Menurut Hukum Islam Dalam kitab-kitab fiqh klasik, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang di hasilkan oleh suami istri selama mereka diikati oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan

syirkah antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat di bedakan lagi.⁴ Adanya Harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Harta bersama tersebut dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, sedang yang tidak berwujud bisa berupa hak dan kewajiban. Keduanya dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan dari pihak lainnya. Suami istri, tanpa persetujuan dari salah satu pihak, tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tersebut. Dalam hal ini, baik suami istri, mempunyai pertanggung jawaban untuk menjaga harta bersama.⁵

b. Royalti

Pengertian royalti adalah jumlah yang dibayarkan untuk penggunaan properti seperti hak paten dan hak cipta lainnya. Misalnya, pencipta mendapat bayaran royalti ketika ciptaannya diproduksi dan dijual, penulis dapat memperoleh royalti ketika buku hasil karya tulisnya dijual. Seperti halnya fungsi royalti ini juga dapat melindungi pemilik HAKI atau

⁴ Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan Kedua, (Jakarta, Kencana, 2006) hal. 109.

⁵ Tihami & Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, Ct. 3 (Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hal. 179.

hak cipta. Peraturan royalti dalam UU Hak Cipta Bab IV tentang pencipta pasal 35 Ayat (2) dalam hak ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara komersial, pencipta atau pemegang hak cipta terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk royalti.

c. Hukum Positif

Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan itegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.

d. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Untuk memahami Kompilasi Hukum Islam ini Perlu dijelaskan terlebih dahulu arti kompilasi dan sejarahnya. Penjelasan dibutuhkan karena fakta menunjukkan bahwa masih Banyak orang yang masih belum sepenuhnya memahami arti dari kompilasi itu. meskipun dalam lingkup analisis hukum juga. Asal usul kata "kompilasi" adalah dari bahasa Latin *compilare*. Atau disebut "*compilatie*" (kumpulan undang-undang) dalam bahasa Belanda. "*Compilatie*" ditulis sebagai kumpulan dari karangan-karangan lain.

Diperlukan Kompilasi Hukum Islam untuk Pengadilan Agama telah

lama menjadi bagian penting dalam sejarah Departemen Agama. Pengeluaran surat Edaran dari Kepala Biro Peradilan Agama Nomor. B tgl 1/735 tanggal 18 Februari 1958 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 yang mengatur tentang pembentukan Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah di luar pulau Jawa dan Madura menunjukkan salah satu bukti tentang hal tersebut.

Dilihat dari cara pembentukannya yang mengumpulkan hukum-hukum dari berbagai kitab Fiqih yang diakui. dipegawai dan dikenali oleh cendekiawan agama) yang sering digunakan sebagai referensi bagi para hakim dalam mengambil keputusan dalam kasus - yaitu Kompilasi Hukum Islam bisa dipahami sebagai deskripsi tentang berbagai aspek dari hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam diolah, diperluas, dan diatur secara terencana. dengan mengacu pada formulasi kalimat atau pasal-pasal yang biasa digunakan dimanfaatkan dalam aturan hukum.

KHI digunakan sebagai salah satu hukum materiil. hukum agama. KHI muncul saat bermacam-macam keputusan pengadilan muncul. agama, di antara sistem peradilan agama satu dengan yang lain tidak seragam, bahkan kadang-kadang dalam situasi yang sama keputusan juga bisa bervariasi. Ini terjadi karena jumlah banyaknya kitab rujukan yang tersedia. digunakan oleh hakim agama dalam memutuskan kasus tersebut yang masih belum diolah yang terdapat dalam kitab kuning.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan dalam penyusunan skripsi ini, maka peneliti membuat sistematika penelitian sebagai berikut:

Bagian Awal: Halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman keaslian, motto, persembahan, pedoman transliterasi, dan abstrak.

Penulisan skripsi ini nantinya akan disusun dengan sistematika yang berisikan sub-sub bab tersendiri, antara lain:

Bab I Pendahuluan: Pada bab ini penyusun akan menulis tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka: Berisi tentang kajian teori yang berkaitan dengan wali nikah dan *masalah mursalah*. Pada bab ini juga berisi mengenai penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian: Berisi tentang gambaran umum terkait dengan metode atau teknik yang digunakan dalam implementasi. Di mana penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung pada lokasi penelitian kemudian melakukan wawancara kepada para pihak yang ada secara mendalam dan diperkuat dengan adanya

dokumentasi penelitian ini disebut field research. Pada bab ini berisi tentang lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian: Memuat tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung terkait implementasi. Setelah paparan data diperoleh selama kegiatan penelitian telah dipaparkan, maka hal berikutnya memaparkan temuan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Di mana penelitian ini akan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan sementara atau penelitian yang telah dilakukan.

BAB V Pembahasan: Berisi tentang pembahasan, pada bab ini peneliti akan membahas mengenai pembahasan atau analisis data yang telah didapatkan akan digabungkan serta dianalisis dalam bentuk analisis deskriptif guna menjawab pertanyaan penelitian terkait implementasi yang akan dibagi menjadi beberapasubbab.

BAB VI Penutup: Berisikan tentang kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan implementasi kemudian juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.